

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Pendahuluan

Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) tumbuh subur di sejumlah daerah. Ini terlihat dari data yang dilaporkan oleh Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (Kemenkop UKM), total UMKM di Indonesia tembus 8,71 juta unit usaha pada 2022. Pulau Jawa mendominasi sektor ini. Tercatat, Jawa Barat menjadi juara UMKM dengan jumlah 1,49 juta unit usaha. Tipis di urutan kedua ada Jawa Tengah yang mencapai 1,45 juta unit. Ketiga, ada Jawa Timur sebanyak 1,15 juta unit. Di luar tiga besar itu, gapnya cukup jauh. DKI Jakarta yang menyabet posisi keempat bisa menorehkan hampir 660 ribu unit. Kelima, ada Sumatera Utara dengan capaian 596 ribu unit. Sementara jumlah usaha paling sedikit ada di tiga daerah, yakni Papua Barat 4,6 ribu unit usaha, Maluku Utara 4,1 ribu unit, dan Papua 3,9 ribu unit (Kemenkop UKM, 2022).

Berdasarkan UU Nomor 20 tahun 2008 tentang UMKM, ada sejumlah kriteria untuk menggolongkan UMKM. Untuk usaha mikro, kekayaan bersih paling banyak Rp50 juta, tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha. Atau, usaha itu memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp300 juta. Adapun usaha kecil, kekayaan bersihnya lebih dari Rp50 juta sampai paling banyak Rp500 juta, tidak termasuk tanah dan bangunannya. Usaha kecil juga bisa digolongkan dari hasil penjualan tahunan lebih dari Rp300 juta hingga maksimal Rp2,5 miliar. Terakhir untuk usaha menengah, golongan ini memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp500 juta dan paling banyak Rp10 miliar, tidak termasuk tanah dan bangunan usaha. Bisa

juga dilihat dari hasil penjualan tahunan lebih dari Rp2,5 miliar dan maksimal Rp50 miliar (Kemenkop UKM, 2022). Provinsi Bali sendiri mengalami peningkatan jumlah UMKM dimana per Mei tahun 2022 mencapai 440.609 unit. Sedangkan di 2021, jumlah UMKM di Bali mencapai 412.265 unit. Jika dibandingkan, terdapat kenaikan sebanyak 28.344 UMKM atau 6,4 persen dari tahun sebelumnya (Dinas Koperasi dan UMKM Bali, 2022).

Kontribusi UMKM terhadap pertumbuhan perekonomian di Indonesia sangat besar dan merupakan salah satu industri utama, UMKM ini mampu menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar. Seiring waktu kita semakin menyadari bahwa UMKM sangat berperan penting dalam perekonomian bangsa. UMKM berperan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi, dan meratakan pendapatan melalui berwirausaha (Julyanda, 2018). Kontribusi UMKM juga terlihat dari besarnya jumlah penyerapan tenaga kerja dari departemen UMKM. Banyaknya jumlah UMKM mencerminkan besarnya potensi yang dapat dikembangkan serta meningkatkan kemampuan UMKM yang dapat lebih berkontribusi bagi negara ini. Usaha mikro kecil dan menengah adalah sebuah usaha yang banyak diminati oleh pengusaha di Indonesia, alasannya karena usaha mikro kecil dan menengah ini pengelolaannya tidak terlalu rumit, dan dari berbagai kalangan dapat memilikinya, serta dari sisi biaya tidak membutuhkan biaya yang terlalu besar (Safitri, 2018). Usaha kecil dan menengah (UKM) merupakan awal dari pertumbuhan usaha besar. Hampir semua usaha besar dimulai dari usaha kecil dan menengah oleh karena itu usaha kecil menengah harus ditambah lagi agar dapat bersaing dengan usaha besar (Bintoro, 2019). Menurut Rosenfeld perkembangan usaha kecil merupakan penggerak pembangunan negara. Perkembangan UMKM memegang peranan

penting dalam pembangunan negara, yang menjadikan pengembangan UMKM diupayakan agar dapat menjangkau dan meratakan pedesaan. Kontribusi UMKM terhadap perekonomian sangatlah besar, menjadikannya pilar pendapatan dan lapangan kerja yang kuat.

Pertumbuhan ekonomi tersebut berdampak langsung pada peningkatan lapangan pekerjaan. Oleh karena itu, peran pedagang besar atau kecil mendukung dalam peningkatan pertumbuhan ekonomi (Wulandari, 2019). UMKM memiliki peran penting untuk pembangunan ekonomi dan mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia. Dengan adanya sektor UMKM pengangguran akibat angkatan kerja yang tidak terserap bisa memulai usaha melalui penciptaan lapangan kerja baru bagi penduduk Indonesia (Rahayu, 2017).

Penelitian ini dilaksanakan di Kota Denpasar, dengan objek penelitian Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Adapun data UMKM di Kota Denpasar tahun 2017-2022 disajikan pada tabel 1.1 berikut ini.

Tabel 1.1
Data Perkembangan UMKM di Denpasar Tahun 2017-2022

No	Tahun	Jumlah UMKM
1	2017	31905
2	2018	32761
3	2019	30840
4	2020	25826
5	2021	28596
6	2022	30256

Sumber : Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kota Denpasar, 2022

Tabel 1.1 menunjukkan bahwa perkembangan UMKM di Kota Denpasar dapat dikatakan produktif lantaran pada tahun 2017 hingga 2018 mengalami peningkatan, sedangkan pada tahun 2019-2020 mengalami penurunan yang

dikarenakan adanya pandemic Covid 19, tahun 2021 mengalami peningkatan yang cukup baik jika dibandingkan tahun 2020, dan tahun 2022 mengalami peningkatan yang cukup signifikan.

Naik-turunnya jumlah UMKM tidak terlepas dari berbagai masalah yang dihadapi oleh para pelaku UMKM, masalah tersebut antara lain keberlanjutan UMKM yang belum optimal. Keberlanjutan usaha (*business sustainability*) suatu UMKM merupakan tingkat keberhasilan suatu bisnis dalam melakukan inovasi, mewujudkan kesejahteraan karyawan dan pelanggan, dan mengenai *return on equity* bisnisnya. Hal ini akan menunjukkan bagaimana perusahaan memiliki peluang untuk berkembang dan mampu berinovasi secara berkelanjutan. Menurut Aribawa (2016) diperlukan pendekatan strategis untuk meningkatkan kinerja UMKM, salah satunya adalah literasi keuangan.

Literasi keuangan adalah pengetahuan, keyakinan dan keterampilan yang mempengaruhi sikap dan perilaku untuk meningkatkan kualitas pengambilan keputusan dan pengelolaan keuangan dalam rangka kesejahteraan. Literasi keuangan merupakan pengetahuan tentang keuangan yang harus diketahui oleh masyarakat yang tidak hanya didapatkan melalui pendidikan tetapi juga bisa didapatkan melalui hal lain. Berdasarkan indeks Link 2023, terkini Indonesia mendapat skor indeks literasi keuangan sebesar 69,7. Literasi keuangan sangat penting bagi pengusaha UMKM, karena literasi keuangan dapat memberdayakan UMKM tentang sumber-sumber pendanaan dari keterampilan yang akan membekali UMKM untuk menimbang pilihan mereka dalam mencari pembiayaan untuk mengoptimalkan struktur keuangannya. Untuk mewujudkan peningkatan jumlah UMKM maka perlu pembinaan dalam menunjang keberlanjutan UMKM

dengan cara memberikan pemahaman terhadap literasi keuangan (Akhiar *et al.*, 2021).

Hasil penelitian terkait dengan pengaruh literasi keuangan terhadap kinerja dan keberlangsungan usaha UMKM dilaksanakan oleh Mulyanti (2022) menunjukkan literasi keuangan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan UMKM. Penelitian Mirdiyantika (2023) menunjukkan literasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap peningkatan kinerja UMKM. Penelitian Sari (2022) menunjukkan literasi keuangan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja UMKM, sedangkan penelitian dengan hasil yang berbeda dilaksanakan oleh Kusumaningrum (2023) menunjukkan literasi keuangan berpengaruh negatif terhadap kinerja keuangan.

Hasil penelitian terkait dengan pengaruh literasi keuangan terhadap keberlangsungan usaha dilaksanakan oleh Hilmawati (2021) menunjukkan bahwa literasi keuangan memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap keberlangsungan sektor UMKM. Hasil penelitian dari Sari (2022) menunjukkan bahwa literasi keuangan berpengaruh positif dan signifikan terhadap keberlangsungan Usaha UMKM. Penelitian dari Sugita (2022) menunjukkan bahwa literasi keuangan berpengaruh positif dan signifikan terhadap keberlanjutan UMKM, sedangkan penelitian dengan hasil yang berbeda dilaksanakan oleh Mila (2022) menunjukkan literasi finansial tidak berpengaruh terhadap keberlanjutan UMKM. Penelitian dari Rusyida (2023) menunjukkan literasi keuangan tidak berpengaruh terhadap keberlangsungan usaha UMKM.

Faktor lain yang dapat mempengaruhi keberlanjutan UMKM adalah inklusi keuangan. *Center for Financial Inclusion mendefinisikan* inklusi keuangan sebagai

akses terhadap produk keuangan yang sesuai termasuk kredit, tabungan, asuransi dan pembayaran, terjadinya akses yang berkualitas termasuk kenyamanan, keterjangkauan, kesesuaian dengan memperhatikan perlindungan konsumen serta ketersediaan tersebut juga diberikan kepada semua orang. Masyarakat yang telah mengetahui lembaga jasa keuangan, terampil memanfaatkan produk dan layanan jasa keuangan, serta memiliki keyakinan terhadap lembaga jasa keuangan perlu didukung dengan ketersediaan akses kepada lembaga, produk dan layanan jasa keuangan (Wulandari *et al.*, 2020).

Penelitian terkait pengaruh inklusi keuangan terhadap kinerja dilaksanakan Fadilah (2022) menunjukkan bahwa inklusi keuangan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan UMKM. Mirdiyantika (2023) menunjukkan bahwa inklusi keuangan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan UMKM. Hasil penelitian Sanistasya (2019) menunjukkan bahwa inklusi keuangan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan UMKM. Hasil penelitian Christanty (2022) menunjukkan bahwa inklusi keuangan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan UMKM dan Hasil penelitian Nurlianti (2022) menunjukkan bahwa inklusi keuangan berpengaruh positif terhadap kinerja UMKM, sedangkan hasil penelitian Putri (2022) menunjukkan bahwa inklusi keuangan berpengaruh negatif terhadap kinerja keuangan UMKM dan hasil penelitian Jumady (2022) menunjukkan inklusi keuangan berpengaruh negatif terhadap kinerja.

Penelitian terkait dengan pengaruh inklusi keuangan terhadap keberlangsungan usaha dilaksanakan oleh Kusuma (2021) menunjukkan inklusi keuangan berpengaruh positif dan signifikan terhadap keberlanjutan usaha. Sugita

(2022) menunjukkan inklusi keuangan berpengaruh positif dan signifikan terhadap keberlanjutan UMKM. Penelitian Maulana (2022) menunjukkan inklusi keuangan berpengaruh positif dan signifikan terhadap keberlangsungan usaha UMKM. Penelitian Yanti (2022) menunjukkan inklusi keuangan berpengaruh positif dan signifikan terhadap keberlangsungan usaha. Penelitian Yunus (2022) menunjukkan inklusi keuangan berpengaruh positif dan signifikan terhadap keberlangsungan usaha, sedangkan penelitian dengan hasil yang berbeda dilaksanakan Hilmawati (2021) menunjukkan bahwa inklusi keuangan tidak berpengaruh keberlangsungan sektor UMKM. Penelitian yang dilaksanakan oleh Sari (2022) menunjukkan inklusi keuangan tidak berpengaruh terhadap keberlangsungan usaha UMKM.

Pemahaman serta pengetahuan mengenai literasi keuangan dan inklusi sangat penting dimiliki oleh pelaku UMKM. Hal tersebut dikarenakan inklusi dan literasi keuangan berpengaruh terhadap pengelolaan keuangan yang akan memberikan dampak terhadap kinerja dan keberlangsungan UMKM (Desiyanti, 2016). Oleh karena itu, UMKM memerlukan upaya-upaya strategis untuk mencapai kinerja yang unggul dan bisnis yang berkelanjutan. Kinerja merupakan ukuran keberhasilan sebuah perusahaan dalam mencapai tujuannya. Kinerja merupakan hasil dari suatu proses yang mengacu dan diukur selama periode waktu tertentu berdasarkan ketentuan, standar atau kesepakatan yang telah ditetapkan sebelumnya (Lubis *et al.*, 2018 dalam Ambarwati, 2021).

Penelitian ini mengambil obyek Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Kota Denpasar khususnya sektor kuliner. Alasan memilih sektor kuliner adalah karena sektor kuliner sedang mengalami perkembangan yang sangat pesat di Kota Denpasar, dimana UMKM sektor kuliner di Kota Denpasar tahun 2022 sebanyak

4145, dengan rincian UMKM Kuliner dengan kategori usaha Mikro jumlah 4036, usaha kecil sebanyak 65 dan usaha menengah sebanyak 44. (Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kota Denpasar, 2022).

Berdasarkan observasi awal yang dilaksanakan terhadap beberapa UMKM kuliner, dalam kegiatannya ditemukan penomena mengenai literasi keuangan, inklusi keuangan, kinerja keuangan dan keberlangsungan UMKM. Berdasarkan penelitian awal yang dilakukan terhadap pelaku UMKM kuliner di kota Denpasar diperoleh informasi permasalahan mengenai literasi keuangan pada usaha UMKM khususnya sebagian besar belum mengetahui atau belum paham mengenai literasi keuangan dalam mengelola keuangan. Permasalahan mengenai inklusi keuangan pada UMKM di Kota Denpasar adalah akses permodalan, akses permodalan merupakan hal yang paling sering menjadi penghambat bagi para pelaku usaha UMKM. Permasalahan mengenai kinerja keuangan pada pelaku usaha UMKM di Kota Denpasar adalah para pelaku usaha UMKM mengelola keuangannya tidak secara sistematis, pelaku UMKM mencampurkan keuangan pribadi dengan keuangan usaha. Permasalahan mengenai keberlangsungan usaha dari pelaku usaha UMKM di Kota Denpasar adalah para pelaku usaha UMKM belum mengetahui cara mengembangkan atau meningkatkan usahanya agar keberlangsungan usaha tetap berjalan.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka permasalahan yang dapat dirumuskan dalam penelitian ini antara lain:

1. Apakah literasi keuangan berpengaruh positif terhadap kinerja UMKM di Kota

Denpasar?

2. Apakah inklusi keuangan berpengaruh positif terhadap kinerja UMKM di Kota Denpasar?
3. Apakah literasi keuangan berpengaruh positif terhadap keberlangsungan UMKM di Kota Denpasar?
4. Apakah inklusi keuangan berpengaruh positif terhadap keberlangsungan UMKM di Kota Denpasar?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka tujuan dari penelitian ini antara lain:

1. Untuk mengetahui pengaruh literasi keuangan terhadap kinerja UMKM di Kota Denpasar.
2. Untuk mengetahui pengaruh inklusi keuangan terhadap kinerja UMKM di Kota Denpasar.
3. Untuk mengetahui pengaruh literasi keuangan terhadap keberlangsungan UMKM di Kota Denpasar.
4. Untuk mengetahui pengaruh inklusi keuangan terhadap keberlangsungan UMKM di Kota Denpasar.

1.4 Kegunaan Penelitian

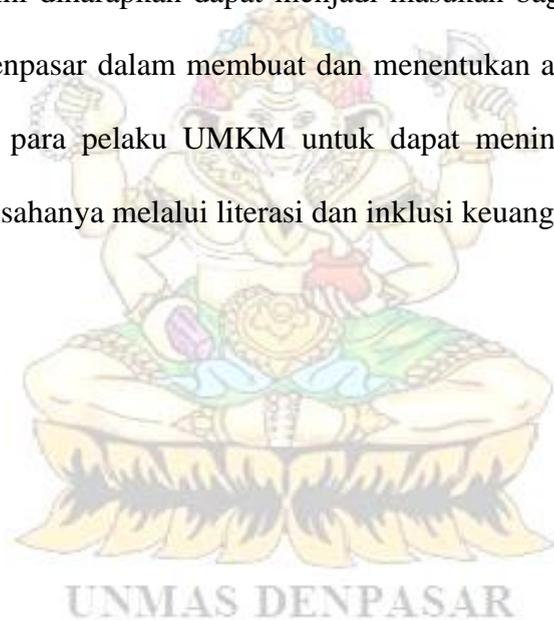
Berdasarkan tujuan penelitian, maka penelitian ini diharapkan dapat memberi kegunaan sebagai berikut.

1.4.1 Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan referensi dan menambah hasil studi empiris mengenai topik Literasi Keuangan dan **Inklusi** Keuangan Terhadap Kinerja dan Keberlangsungan UMKM di Kota Denpasar bagi mahasiswa serta dapat digunakan referensi apabila ingin membahas permasalahan yang sama serta dapat memberikan gambaran dan penerapan dari teori yang telah diperoleh pada masa perkuliahan.

1.4.2 Kegunaan Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi pemerintah daerah khususnya Kota Denpasar dalam membuat dan menentukan arah kebijakan terkait UMKM dan bagi para pelaku UMKM untuk dapat meningkatkan kinerja dan keberlangsungan usahanya melalui literasi dan inklusi keuangan.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Teori Sinyal (*Signalling Teory*)

Teori Sinyal (*Signalling Teory*) atau biasa dikatakan sebagai teori *pensignalan* merupakan pemberian sinyal atau informasi kepada setiap investor untuk mengetahui tentang keadaan perusahaan. Teori sinyal merupakan suatu sinyal yang diberikan perusahaan untuk memberikan informasi mengenai keberhasilan maupun kegagalan manajemen dan akan disampaikan kepada pemilik atau investor (Adnyani & Gayatri, 2018). Teori sinyal (*signaling theory*) pertama kali dikemukakan oleh Spence (1973) yang menjelaskan bahwa pihak pengirim (pemilik informasi) memberikan suatu isyarat atau sinyal berupa informasi yang mencerminkan kondisi suatu perusahaan yang bermanfaat bagi pihak penerima (investor).

Teori sinyal menjelaskan tentang persepsi manajemen terhadap pertumbuhan atau keberlangsungan perusahaan di masa depan, dimana akan mempengaruhi respon calon investor terhadap perusahaan. Sinyal tersebut berupa informasi yang menjelaskan tentang upaya manajemen dalam mewujudkan keinginan pemilik. Informasi tersebut dianggap sebagai indikator penting bagi investor dan pelaku bisnis dalam hal ini pelaku UMKM untuk mengambil keputusan investasi. Informasi yang telah disampaikan oleh perusahaan dan diterima oleh investor, akan diinterpretasikan dan dianalisis terlebih dahulu apakah informasi tersebut dianggap sebagai sinyal positif (berita baik) atau sinyal negatif (berita

buruk) (Alivia et al., 2020). Teori sinyal juga menjelaskan bagaimana seharusnya perusahaan memberi sinyal kepada pemilik atau pihak yang memiliki kepentingan mengenai informasi kondisi perusahaan (Susilowati, 2011). Selain itu, sinyal dapat diberikan juga melalui pengungkapan informasi mengenai kinerja keuangan melalui laporan berupa keuangan..

2.1.2 Pengertian Literasi Keuangan

Menurut Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 76/POJK.07/2016 tentang Peningkatan Literasi dan Inklusi Keuangan di Sektor Jasa Keuangan Bagi Konsumen dan Masyarakat. Literasi keuangan adalah pengetahuan, keterampilan, dan keyakinan yang mempengaruhi sikap dan perilaku untuk meningkatkan kualitas pengambilan keputusan dan pengelolaan keuangan dalam rangka mencapai kesejahteraan. Menurut Strategi Nasional Keuangan Indonesia (2017:18) literasi keuangan adalah rangkaian proses atau aktivitas untuk meningkatkan pengetahuan (*knowledge*), keyakinan (*confidence*) dan keterampilan (*skill*) konsumen dan masyarakat luas sehingga mereka mampu mengelola keuangan yang lebih baik. Konsumen dan masyarakat dengan tingkat literasi keuangan yang tinggi akan memiliki kemampuan memberikan kapasitas produksi yang lebih tinggi.

Dalam Otoritas Jasa Keuangan (2017) mengidentifikasi literasi keuangan sebagai pengetahuan dan pemahaman atas konsep dan risiko keuangan, berikut keterampilan, motivasi serta keyakinan untuk menerapkan pengetahuan dan pemahaman yang dimilikinya tersebut dalam rangka membuat keputusan yang efektif, meningkatkan kesejahteraan keuangan individu dan masyarakat, dan berpartisipasi dalam bidang ekonomi.

Perlunya memperluas literasi keuangan di masyarakat akan membentuk

pola pikir yang memiliki daya saing lebih tinggi. Di berbagai negara menerapkan strategi nasional salah satunya yaitu literasi keuangan sebagai program prioritas mereka. Program prioritas yang dimaksud yaitu literasi keuangan dapat menjadi salah satu cara untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, mengurangi tingkat kemiskinan, mengurangi ketimpangan pendapatan dan mendukung pencapaian stabilitas sistem keuangan (Setiawan, 2018).

Dari pengertian diatas dapat diartikan bahwa literasi keuangan adalah seseorang yang memiliki kemampuan, pengetahuan, keterampilan dan keyakinan dalam mengelola keuangan perusahaan dengan lebih baik untuk mencapai kesejahteraan perusahaan.

2.1.3 Tujuan Literasi Keuangan

Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 76/POJK.07/2016 tentang Peningkatan Literasi dan Inklusi Keuangan di Sektor Jasa Keuangan Bagi Konsumen dan Masyarakat, tujuan dari literasi keuangan sebagai berikut: Tujuan Literasi Keuangan adalah:

- a. Meningkatnya kualitas pengambilan keputusan keuangan individu; dan
- b. Perubahan sikap dan perilaku individu dalam pengelolaan keuangan menjadi lebih baik,

Sehingga mampu menentukan dan memanfaatkan lembaga, produk dan layanan jasa keuangan yang sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan Konsumen dan/atau masyarakat dalam rangka mencapai kesejahteraan.

2.1.4 Prinsip Dasar Literasi Keuangan

Prinsip-prinsip dasar di dalam Otoritas Jasa Keuangan, (2017) yang perlu

dilakukan dalam melaksanakan kegiatan dalam rangka meningkatkan literasi keuangan antara lain :

a. Terencana dan terukur

Penerapan prinsip ini diwujudkan melalui pelaksanaan kegiatan dengan konsep yang sesuai sasaran, strategi, kebijakan otoritas, dan kebijakan PUJK serta mendasarkan pada indikator tertentu untuk memperoleh informasi peningkatan Literasi Keuangan;

b. Berorientasi pada pencapaian

Penerapan prinsip ini diwujudkan melalui kegiatan untuk mencapai tujuan peningkatan Literasi Keuangan dengan mengoptimalkan sumber daya yang ada;

c. Berkelanjutan

Penerapan prinsip ini diwujudkan melalui pelaksanaan kegiatan yang dilakukan secara berkesinambungan untuk mencapai tujuan yang direncanakan serta memiliki aspek jangka panjang terhadap pemahaman Konsumen dan/atau masyarakat mengenai pengelolaan keuangan, lembaga, produk dan/atau layanan jasa keuangan;

d. Kolaborasi

Penerapan prinsip ini diwujudkan melalui keterlibatan berbagai pemangku kepentingan dalam pelaksanaan kegiatan secara bersama-sama dengan memperhatikan peran masing-masing PUJK.

2.1.5 Tingkat Literasi Keuangan

Edukasi literasi keuangan perlu dilakukan di masyarakat. Menurut survei Otoritas Jasa Keuangan, (2017) tingkat literasi keuangan penduduk Indonesia dibagi menjadi empat bagian, yaitu:

- a. *Well literate*, yaitu pengetahuan dan keyakinan terhadap lembaga jasa keuangan dan produk jasa keuangan, termasuk karakteristik, manfaat dan risiko, hak dan kewajiban yang terkait dengan produk dan layanan keuangan, serta keterampilan dalam menggunakan produk dan layanan keuangan.
- b. *Sufficient literate*, Memiliki literasi budaya yang cukup dan memiliki pengetahuan dan keyakinan yang cukup tentang lembaga jasa keuangan dan produk dan jasa keuangan, termasuk karakteristik, manfaat dan risiko, hak dan kewajiban yang terkait dengan produk dan jasa keuangan.
- c. *Less literate*, Tingkat pendidikan yang rendah, hanya pemahaman tentang lembaga jasa keuangan, produk dan jasa keuangan.
- d. *Not literate*, kurangnya pengetahuan dan kepercayaan pada lembaga dan layanan keuangan serta produk dan layanan keuangan, dan kurangnya keterampilan untuk menggunakan produk dan layanan keuangan.

2.1.6 Faktor-faktor yang Mempengaruhi Literasi Keuangan

Menurut pendapat dari Suryanto dan Rasmini mengungkapkan faktor yang mempengaruhi literasi keuangan ada 3 yaitu usia, tingkat pendidikan dan pendapatan usaha (Suryanto & Rasmini, 2018). Menurut Otoritas Jasa Keuangan mengungkapkan faktor yang mempengaruhi literasi keuangan yaitu jenis kelamin, tingkat pendidikan, tingkat pendapatan (OJK, 2017), sedangkan berdasarkan Ansong dan Gyensare (2013) mengungkapkan faktor faktor yang mempengaruhi literasi keuangan yaitu usia, pengalaman kerja, pendidikan ibu, jurusan.

2.1.7 Indikator Literasi Keuangan

Literasi keuangan diukur dengan 4 indikator dalam penelitian ini, menurut (Yanti, 2019) indikator tersebut antara lain:

a. Pengetahuan dasar tentang pengelolaan keuangan

Pengetahuan dasar tentang pengelolaan keuangan berkaitan pada pemahaman seseorang tentang bagaimana mengelola keuangan usaha, pribadi atau keluarga (Yanti, 2019). Pengelolaan keuangan adalah cara untuk mengelola keuangan secara efektif dan efisien

b. Investasi

Investasi adalah menyimpan sejumlah uang atau aset yang disimpan untuk memperoleh pendapatan lebih di masa yang akan datang

c. Tabungan dan pengelolaan kredit

Pengelolaan tabungan adalah suatu cara untuk mencari kelebihan dana yang dimiliki individu untuk memperoleh likuiditas dengan cepat (Saputri, 2019).

Pengelolaan kredit adalah suatu proses dimana pemilik usaha mengelola hutangnya agar digunakan secara tepat sesuai dengan tujuan awal pemberian pinjaman (Saputri, 2019).

d. Asuransi

Asuransi adalah untuk mencegah atau meminimalkan risiko yang timbul dari pengambilan keputusan yang dibuat oleh seorang pengelola perusahaan (Saputri, 2019).

2.1.8 Pengertian Inklusi Keuangan

Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 76/POJK.07/2016 tentang Peningkatan Literasi dan Inklusi Keuangan di Sektor Jasa Keuangan Bagi Konsumen dan Masyarakat, inklusi keuangan adalah ketersediaan akses pada

berbagai lembaga, produk dan layanan jasa keuangan sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan masyarakat dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat. *Consultative Group to Assist the Poor* dalam Otoritas Jasa Keuangan, (2017) menjelaskan inklusi keuangan sebagai akses yang dimiliki oleh rumah tangga dan bisnis terhadap penggunaan produk dan layanan jasa keuangan secara efektif. Produk dan layanan jasa keuangan tersebut harus tersedia secara berkelanjutan dan teregulasi dengan baik.

Menurut Durai & Stella (2019:122) inklusi keuangan dapat didefinisikan sebagai proses memastikan akses layanan keuangan dan kredit yang dapat diakses oleh golongan lemah dan berpenghasilan rendah dengan biaya yang terjangkau. Menurut Hidayat (2015:55) inklusi keuangan adalah upaya untuk meniadakan segala bentuk hambatan harga maupun non harga terhadap akses masyarakat dalam memanfaatkan layanan jasa keuangan.

Gerdeva & Rhyne (2013:6) mendefinisikan “Inklusi keuangan merupakan kondisi pada saat seluruh masyarakat memiliki akses produk dan layanan jasa keuangan. Menurut Wahid (2014:54) *financial inclusion* merupakan rencana pembiayaan inklusif yang tujuan utamanya memberikan berbagai layanan keuangan kepada masyarakat miskin dan berpenghasilan rendah. Bank Indonesia (2014:4) mendefinisikan keuangan inklusif (*financial inclusion*) sebagai seluruh upaya yang bertujuan meniadakan segala bentuk hambatan yang bersifat harga maupun non harga, terhadap akses masyarakat dalam memanfaatkan layanan jasa keuangan

Dari berbagai pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa inklusi keuangan ketersediaan akses layanan keuangan ke berbagai lembaga, produk maupun layanan keuangan yang dapat dijangkau dengan mudah, nyaman dan aman oleh seluruh

lapisan masyarakat disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan masyarakat guna untuk mencapai kesejahteraan.

2.1.9 Tujuan Inklusi Keuangan

Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 76/POJK.07/2016 tentang Peningkatan Literasi dan Inklusi Keuangan di Sektor Jasa Keuangan Bagi Konsumen dan Masyarakat, tujuan dari inklusi keuangan meliputi:

- a. Meningkatnya akses masyarakat terhadap lembaga, produk dan layanan jasa keuangan PUJK.
- b. Meningkatnya penyediaan produk dan/atau layanan jasa keuangan yang disediakan oleh PUJK yang sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan masyarakat.
- c. Meningkatnya penggunaan produk dan/atau layanan jasa keuangan yang sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan masyarakat.
- d. Meningkatnya kualitas pemanfaatan produk dan layanan jasa keuangan sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan masyarakat.

2.1.10 Prinsip Dasar Inklusi Keuangan

Prinsip dasar inklusi keuangan yang terdapat di dalam Otoritas Jasa Keuangan,(2017) antara lain:

- a. Terukur

Perencanaan dan pelaksanaan kegiatan dalam rangka meningkatkan inklusi keuangan dengan mempertimbangkan jangkauan wilayah, biaya, waktu, sistem teknologi, dan memiliki mitigasi terhadap potensi risiko yang timbul dari transaksi produk dan/atau layanan jasa keuangan sehingga akses yang disediakan dan produk dan/atau layanan jasa keuangan yang dikembangkan memiliki

karakteristik yang sesuai dengan sasaran dari kegiatan dalam rangka meningkatkan inklusi keuangan.

b. Terjangkau

Pelaksanaan kegiatan dalam rangka meningkatkan inklusi keuangan dapat diakses oleh seluruh golongan masyarakat dengan biaya murah atau tanpabiaya, serta pemanfaatan teknologi.

c. Tepat Sasaran

Pelaksanaan kegiatan dalam rangka meningkatkan inklusi keuangan sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan konsumen dan masyarakat yang menjadi sasaran.

d. Berkelanjutan

Pelaksanaan kegiatan dalam rangka meningkatkan inklusi keuangan dilakukan secara berkesinambungan untuk mencapai target yang direncanakan serta memiliki aspek jangka panjang yang mengutamakan kebutuhan dan kemampuan konsumen dan/atau masyarakat.

2.1.11 Indikator Inklusi Keuangan

Sebuah ukuran kinerja diperlukan untuk mengetahui tingkat perkembangan kegiatan inklusi keuangan. Menurut penelitian (Sanistasya, 2019) indikator dalam pengembangan inklusi keuangan antara lain :

a. Akses terhadap lembaga keuangan (*Access*)

Merupakan faktor yang digunakan untuk mengukur kemampuan menggunakan jasa keuangan untuk memahami potensi yang menjadi hambatan dalam membuka dan menggunakan rekening bank, seperti bentuk fisik layanan jasa keuangan seperti ATM, kantor bank, dll (Sanistasya, 2019).

b. Penggunaan produk/layanan keuangan (*Usage*)

Merupakan faktor yang digunakan untuk mengukur penggunaan jasa keuangan dan penggunaan produk, seperti waktu penggunaan, frekuensi, serta keteraturan akan ketersediaan layanan dan produk keuangan yang memenuhi kebutuhan pelanggan (Sanistasya, 2019).

c. Kualitas produk dan layanan keuangan (*Quality*)

Merupakan kriteria untuk menentukan ketersediaan layanan dan produk keuangan yang sesuai dengan permintaan pelanggan (Sanistasya, 2019).

d. Kesejahteraan nasabah (*Welfare*)

Merupakan kriteria untuk mengukur pengaruh jasa keuangan terhadap tingkat kehidupan pengguna jasa (Sanistasya, 2019).

2.1.12 Pengertian Kinerja

Menurut Mutegi, *et al.*, (2015) Kinerja UMKM adalah hasil dan evaluasi kerja suatu perusahaan yang diperoleh individu atau kelompok dalam bentuk pembagian kegiatan dengan tugas dan tanggung jawab untuk jangka waktu yang telah ditentukan sesuai dengan standar perusahaan. Menurut Trianto (2017) kinerja keuangan adalah ukuran kesehatan keuangan perusahaan berdasarkan indikator profitabilitas, kecukupan modal, dan likuiditas selama periode waktu tertentu. Kinerja keuangan merupakan hasil atau pencapaian dari pengelolaan aset yang efektif dan efisien selama periode waktu tertentu. Kinerja keuangan merupakan penentuan indikator yang dapat mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba (Wulandari, 2020).

Kinerja keuangan merupakan peran penting perusahaan dalam menentukan dan mengevaluasi tingkat keberhasilan suatu perusahaan berdasarkan operasi

keuangan yang telah dilakukan (Rudianto, 2013). Menurut Moehariono (2013:95) kinerja merupakan tercapainya pelaksanaan suatu kegiatan atau program dalam rangka mencapai misi, visi, tujuan organisasi serta sasaran yang ditetapkan oleh perusahaan. Kinerja UMKM merupakan keseluruhan hasil kerja yang dicapai dan dibandingkan dengan tujuan, hasil kerja, serta sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya (Wahyudiati, 2017). Dari uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa kinerja keuangan UMKM merupakan pencapaian usaha dalam menciptakan laba.

2.1.13 Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kinerja

Menurut (Munizu, 2020) ada dua jenis faktor yang mempengaruhi kinerja UMKM, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal adalah faktor yang berfungsi sebagai dasar untuk mengembangkan tujuan dan strategi untuk meningkatkan kekuatan organisasi dan mengatasi kekurangan.

Faktor internal meliputi :

a. Aspek keuangan

Kemampuan usaha dalam perolehan laba, modal sendiri, dan modal pinjaman.

b. Aspek produksi atau operasional

Penggunaan bahan baku, ketersediaan dan pemeliharaan mesin/ peralatan, dan pemanfaatan teknologi modern.

c. Aspek pasar dan pemasaran

Penetapan harga, segmentasi pasar, kegiatan promosi, dan kualitas produk.

d. Aspek sumber daya manusia

Penyeleksian, pengalaman kerja, pemberian penghargaan, dan pembagian tugas.

e. Faktor eksternal adalah faktor yang mempengaruhi proses pengambilan keputusan perusahaan dan tindakan yang akan dilakukannya.

Faktor eksternal meliputi :

- 1) Aspek kebijakan pemerintah pembinaan, penyediaan informasi, dan akses izin usaha.
- 2) Aspek peranan lembaga terkait bantuan permodalan, pelatihan, dan monitoring.
- 3) Aspek sosial budaya dan ekonomi tingkat pendapatan masyarakat, kebutuhan konsumen dan budaya daerah, dan karakteristik masyarakat.

2.1.14 Indikator Kinerja

Indikator kinerja UMKM yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menurut Yanti (2019), sebagai berikut:

a. Pertumbuhan Usaha

Pertumbuhan usaha merupakan kemampuan suatu usaha dalam meningkatkan penjualan, keuntungan, dan melakukan diversifikasi dalam lini produk.

b. Total Pendapatan Usaha

Total pendapatan usaha berasal dari kegiatan utama perusahaan yaitu semua pendapatan yang didapatkan dari selisih antara penerimaan dengan total biaya dalam kurun waktu tertentu.

c. Total Order

Total order merupakan total pesanan produk yang dipesan atau akan dibeli oleh konsumen.

d. Posisi Kas Usaha

Posisi kas usaha yaitu pencatatan keuangan usaha untuk mengetahui besar keuntungan yang didapatkan dalam sebuah usaha dan Untuk mengetahui arus kas masuk dan arus kas keluar.

2.1.15 Pengertian Keberlangsungan Usaha

Keberlangsungan usaha sangat penting karena merupakan satu-satunya cara bagi organisasi dan sumber dayanya untuk bertahan, singkatnya, keberlangsungan usaha adalah strategi untuk bertahan dari krisis dan memberikan peluang baru (Holliday et al., 2017; Calabrese et al., 2021). Menurut Handayani (2017) keberlangsungan usaha merupakan suatu keadaan atau kondisi usaha, dimana didalamnya terdapat cara-cara untuk mempertahankan, mengembangkan dan melindungi sumber daya serta memenuhi kebutuhan yang ada dalam suatu usaha (industri), cara-cara yang dipergunakan ini bersumber dari pengalaman sendiri, orang lain, serta berlandaskan pada kondisi atau keadaan ekonomi yang sedang terjadi dalam dunia usaha (business) sehingga keberlangsungan usaha merupakan bentuk konsistensi dari kondisi usaha, dimana keberlangsungan ini merupakan proses berlangsungnya usaha baik mencakup pertumbuhan, perkembangan, strategi untuk menjaga kelangsungan usaha dan pengembangan usaha dimana semua ini bermuara pada keberlangsungan dan eksistensi (ketahanan) usaha.

Menurut Widayanti *et al.*, (2017) keberlanjutan usaha adalah suatu kestabilan dari keadaan usaha, yang mana keberlangsungan adalah sistem berlangsungnya usaha yang mencakup pertambahan, kelanjutan dan pendekatan untuk melindungi kelangsungan usaha dan ekspansi usaha. Keberlangsungan suatu

usaha didukung beberapa faktor, adapun faktor tersebut menjadi penyebab kuat agar suatu bisnis dapat bertahan, yaitu adanya kompilasi rencana bisnis (*compilation of a business plan*), pembaharuan rencana bisnis reguler (*regular updating of business plan*), menganalisis pesaing (*regular analysis of competitor*), kemudahan memasuki bisnis baru (*easy of venturing into a new business*) dan kemampuan perhitungan atau kalkulasi resiko (*not a problem to take calculated risks*) (Ligthelm, 2013). Keberlangsungan usaha merupakan strategi bisnis, dimana nilai jangka panjang dihasilkan dari pertimbangan bagaimana organisasi beroperasi dalam lingkungan ekologi, sosial, dan ekonomi (AlQershi et al., 2022).

2.1.16 Manfaat *Business Sustainability* (Keberlanjutan Usaha)

Pelaku usaha tidak hanya cukup untuk memiliki pengetahuan yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan, tetapi juga dapat memahaminya dan menerapkan pengetahuan pengelolaan yang telah dimiliki. Pengetahuan pengelolaan keuangan yang baik di harapkan mampu untuk mengambil keputusan secara tepat sehingga *Business Sustainability* (Keberlanjutan Usaha) dapat terus berkelanjutan (Aribawa, 2016). Hasil tersebut tidak lepas dari manfaat *Business Sustainability* (Keberlanjutan Usaha), seperti yang dilansir dari (**Beritasatu**, 2016) yaitu:

a. Produktivitas Meningkat

Business Sustainability (Keberlanjutan Usaha) hampir sama dengan menyederhanakan proses produksi dan mengurangi aktivitas yang berlebihan, sehinggapbiaya produksi yang dikeluarkan juga berkurang.

b. Membuka Peluang Investasi

Perusahaan yang dapat mengelola keuangan dan lingkungan dengan baik

dan memiliki sumberdaya manusia yang berkesinambungan akan dapat dilirik oleh investor untuk berinvestasi di perusahaan.

c. Meningkatkan keuntungan

Business Sustainability (Keberlanjutan Usaha) tidak lepas dari kelestarian lingkungan. Semakin terjaga lingkungan usaha maka dapat disimpulkan usaha tersebut dapat mendapat keuntungan dari lingkungan sekitar.

d. Sumberdaya manusia yang berkualitas

Sumber daya manusia yang dikelola dengan baik dengan melalui keterampilan dan kemampuan yang dimiliki karyawan akan memotivasi untuk terus belajar dan mampu bersaing secara kompetitif demi mewujudkan kinerja usaha yang baik.

e. Mengefisiensi energi

Teknologi mendukung usaha seperti pemasaran bisa dilakukan secara online, mesin produksi yang di *design* semakin efisien, pembukuan keuangan bisa dilakukan dengan sistem di computer.

Keberlangsungan UMKM Keberlanjutan usaha (*business sustainability*) suatu UMKM dapat diketahui dengan melihat tingkat keberhasilan suatu bisnis dalam melakukan inovasi, mewujudkan kesejahteraan karyawan dan pelanggan, dan mengenai return on equity bisnisnya. Hal ini akan menunjukkan bagaimana perusahaan memiliki peluang untuk berkembang dan mampu berinovasi secara berkelanjutan (Hudson, Andi Smart, 2011).

2.1.17 Indikator-Indikator Keberlangsungan UMKM

Indikator yang digunakan dalam mengukur keberhasilan UMKM

diantaranya pertumbuhan keuangan, pertumbuhan strategi, pertumbuhan struktural, dan pertumbuhan organisasional (Wickham, 2016). Menurut Widayanti (2017:156), berlangsungnya sebuah usaha adalah merupakan suatu kondisi, dimana didalamnya terdapat sesuatu hal untuk dipertahankan untuk berkembang.

Menurut Mahendra (2015:19-23) keberlangsungan usaha dilihat dengan meniru beberapa indikator-indikator penting dalam suatu bentuk usaha, yang antara lain yaitu :

a. Kelangsungan modal

Permodalan termasuk dalam apapun tentang modal yang di pakai dan bagaimana cara untuk mengelolanya. Bila di telaah lagi aspek ini merupakan faktor yang sangat menunjang dan mendukung keberhasilan dalam berwira usaha dalam hal ini pedagang informal, dapat digunakan sebagai modal operasional dan pengolahan usaha, seperti unit produksi, biaya harian produksi, pembelian bahan pokok, biaya promosi, biaya pemasaran, membayar gaji dan sebagainya.

b. Kelangsungan Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia atau tenaga kerja merupakan salah satu asset, bila aspek SDM ini di tingkatkan kapasitasna. Dadalam peningkatapotensi dibutuhkan pelatihan keterampilan dan pengarahan secara teknis dari pelaku usaha demi kemajuan usahanya.

c. Keberangsungan Produksi

Kegiatan produksi memang diperlukan untuk memenuhi atas segala kebutuhan manusia itu sendiri. Terdapat banyakk faktor produksi yangbisa jadi sarana kegiatan. Diharapkan dapat menciptakan produk baru berupa barang atau jasa

yang dibutuhkan masyarakat. Ketersediaan bahan produksi dan peralatan kerja yang akan menunjang keberlangsungan produksi itu sendiri.

d. Keberlangsungan Pemasaran

Pemasaran adalah bentuk kegiatan pokok yang harus dilaksanakan oleh pemilik, baik itu pengusaha barang atau bidang jasa hal ini dilakukan dalam upaya untuk mempertahankan keberlangsungan usahanya. Dalam bisnis, pemasaran merupakan strategi yang dilakukan untuk mendapatkan konsumen sesuai target usaha mereka. Media pemasaran bisa dilakukan dengan banyak cara. Salah satunya adalah dengan mengemas produk dengan cara yang unik, promosi harga, garansi produk sebagai bentuk layanan tambahan.

Kelangsungan Usaha Keberlanjutan usaha (*business sustainability*) pada UMKM dilihat dari keberhasilan perusahaan dalam melakukan inovasi, pengelolaan karyawan dan pelanggan serta pengembalian terhadap modal awalnya (Idawati & Pratama, 2020). Keberlanjutan usaha (*business sustainability*) pada UMKM dapat diketahui berdasarkan keberhasilan pelaku usaha dalam melakukan inovasi, pengelolaan karyawan dan konsumen serta pengembalian terhadap modal yang digunakan dari awal. Hal ini menunjukkan bahwa UMKM memiliki orientasi untuk berkembang dan melihat peluang untuk inovasi secara berkesinambungan (Hudson, et al, 2011)).

2.2. Hasil Penelitian Sebelumnya

Penelitian-penelitian sebelumnya yang terkait dengan penelitian ini, telah dilaksanakan oleh beberapa orang peneliti. Adapun penelitian-penelitian tersebut disajikan pada tabel 2.1 berikut ini.

1. Septiani & Wuryani (2020) dengan judul “Pengaruh Literasi Keuangan Dan

Inklusi Keuangan Terhadap Kinerja UMKM Di Sidoarjo”. Hasil Penelitian menunjukkan literasi keuangan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja UMKM. Inklusi keuangan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja UMKM.

2. Hilmawati (2021), dengan judul “Inklusi Keuangan Dan Literasi Keuangan Terhadap Kinerja Dan Keberlangsungan Sektor Usaha Mikro Kecil Menengah”. Hasil penelitian adalah inklusi keuangan tidak berpengaruh terhadap kinerja dan keberlangsungan sektor UMKM. Literasi keuangan memiliki pengaruh positif dan signifikan yang terhadap kinerja dan keberlangsungan sektor UMKM.
3. Sari (2022) dengan judul “Determinasi Literasi Keuangan dan Inklusi Keuangan Terhadap Kinerja dan Keberlangsungan Usaha UMKM”. Literasi Keuangan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kinerja UMKM. Inklusi Keuangan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kinerja UMKM. Literasi Keuangan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Keberlangsungan Usaha UMKM. Inklusi Keuangan tidak berpengaruh terhadap Keberlangsungan Usaha UMKM. Literasi Keuangan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Inklusi Keuangan UMKM.
4. Sugita (2022) dengan judul “Pengaruh Literasi Keuangan, Inklusi Keuangan dan Akses Permodalan Terhadap Keberlanjutan UMKM Pada Bidang Fashion Di Kota Denpasar”. Literasi Keuangan berpengaruh positif dan signifikan terhadap keberlanjutan UMKM. Inklusi Keuangan berpengaruh positif dan signifikan terhadap keberlanjutan UMKM. Akses permodalan berpengaruh positif terhadap Keberlanjutan UMKM.
5. Dewi (2022) dengan judul “*Relationship of Financial Literacy and Financial*

Performance to Business Sustainability: Study on MSMEs in Denpasar City.

Literasi keuangan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja UMKM.

Literasi keuangan berpengaruh positif dan signifikan terhadap keberlanjutan

UMKM. Inklusi Keuangan berpengaruh positif dan signifikan terhadap

keberlanjutan UMKM. Akses permodalan berpengaruh positif dan signifikan

terhadap keberlanjutan UMKM.

6. Mila (2022) dengan judul “Peran Literasi Finansial dan Inovasi Digital dalam Meningkatkan *Business Performance* dan *Business Sustainability* Pada UMKM di Kabupaten Pekalongan”. Literasi finansial tidak berpengaruh terhadap keberlanjutan UMKM. Literasi finansial berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja UMKM. Inovasi digital berpengaruh positif dan signifikan terhadap keberlanjutan UMKM. Inovasi digital tidak berpengaruh terhadap kinerja UMKM. Kinerja UMKM berpengaruh positif dan signifikan terhadap keberlanjutan UMKM. Kinerja UMKM tidak memediasi pengaruh inovasi digital terhadap keberlanjutan UMKM. Kinerja UMKM dapat memediasi pengaruh literasi finansial terhadap keberlanjutan UMKM.
7. Rusyida (2023) dengan judul “Pengaruh Kemampuan Manajerial, Literasi Keuangan, dan Mitigasi Risiko Terhadap Keberlangsungan Usaha UMKM”. Kemampuan Manajerial secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap Strategi Bertahan pada pelaku UMKM batik yang ada di Pasar Grosir Batik Setono Kota Pekalongan. Literasi Keuangan secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap Strategi Bertahan pada pelaku UMKM batik yang ada di Pasar Grosir Batik Setono Kota Pekalongan. Mitigasi Risiko secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap Strategi Bertahan pada pelaku

UMKM batik yang ada di Pasar Grosir Batik Setono Kota Pekalongan. Kemampuan Manajerial, Literasi Keuangan, Mitigasi Risiko berpengaruh positif dan signifikan secara simultan terhadap Strategi Bertahan pada pelaku UMKM batik yang ada di Pasar Grosir Batik Setono Kota Pekalongan.

8. Idawati (2020) dengan judul “Pengaruh Literasi Keuangan Terhadap Kinerja dan Keberlangsungan UMKM di Kota Denpasar”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa literasi keuangan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja dan keberlangsungan UMKM di Kota Denpasar.
9. Mulyanti (2022) dengan judul “Penerapan Literasi Keuangan Dan Penggunaan Financial Technology Untuk Menilai Kinerja Keuangan UMKM di Jawa Barat”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa literasi keuangan dan *fintech* baik secara parsial maupun simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan UMKM.
10. Mirdiyantika (2023) dengan judul “Pengaruh Literasi Keuangan, Inklusi Keuangan dan Financial Technology Terhadap Peningkatan Kinerja UMKM di Kecamatan Bulakamba”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat pengaruh positif dan signifikan antara literasi keuangan, inklusi keuangan dan *financial technology* terhadap peningkatan kinerja.
11. Putri (2022) dengan judul “Pengaruh Literasi Keuangan, Financial Technology dan Inklusi Keuangan terhadap Kinerja Keuangan Pengusaha Muda”. Hasil penelitian menunjukkan literasi keuangan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan pengusaha muda di Kabupaten Luwu Utara. *Financial technology* berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan pengusaha muda di Kabupaten Luwu Utara. Inklusi keuangan berpengaruh

positif dan tidak signifikan terhadap kinerja keuangan pengusaha muda di Kabupaten Luwu Utara.

12. Jumady (2022) dengan judul “Pengaruh Literasi Keuangan dan Inklusi Keuangan Terhadap Kinerja Usaha Kecil di Kota Makassar”. Hasil penelitian menunjukkan literasi keuangan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja usaha kecil di kota Makassar. Inklusi keuangan berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap kinerja usaha kecil di kota Makassar.
13. Utami (2023) dengan judul “*Analysis of the Use of Financial Technology and Financial Literacy Among MSMEs*”. Hasil penelitian menunjukkan *fintech* dan literasi keuangan memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap keberlangsungan UMKM.
14. Kusuma (2021) dengan judul “Inklusi Keuangan Dan Literasi Keuangan Terhadap Kinerja Dan Keberlanjutan UMKM Di Solo Raya”. Hasil penelitian menunjukkan inklusi keuangan berpengaruh positif dan signifikan terhadap keberlanjutan usaha dan kinerja keuangan UMKM, serta literasi keuangan positif dan signifikan berpengaruh terhadap kinerja keuangan pada UMKM di Solo Raya. Sedangkan variabel literasi keuangan tidak berpengaruh terhadap keberlanjutan usaha pada UMKM di Solo Raya.
15. Yuningsih (2022) dengan judul “Pengaruh Literasi Keuangan dan Financial Technology Terhadap Keberlangsungan Usaha Pelaku UMKM”. Hasil penelitian menunjukkan hasil penelitian menunjukkan literasi keuangan dan *financial technology* berpengaruh positif dan signifikan secara parsial dan simultan terhadap keberlangsungan usaha pelaku UMKM.